

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN**

**( Studi Kasus No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks )**



Oleh

**NUR IMAN**

**B 111 10 325**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN**

**( Studi Kasus No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks )**

**Oleh:**

**NUR IMAN**

**B 111 10 325**

**PROPOSAL PENELITIAN**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi**

**Sarjana dalam Program Bagian Hukum Pidana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN**

**(Studi Kasus Putusan No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR IMAN**

**B11110325**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 21 Agustus 2014  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**H. M. Imran Arief, S.H., M.S**  
NIP. 19470915 197901 1 001

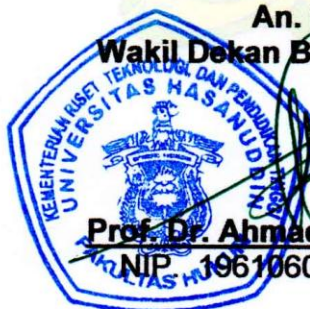
**Sekretaris**



**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H**  
NIP. 19800710 200604 1 001

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : NUR IMAN  
Nomor Induk : B 111 10 325  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENADAHAN  
(Studi kasus No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks)

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi.

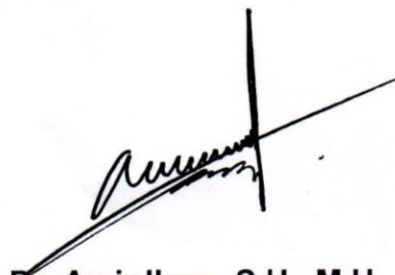
**Makassar, Agustus 2014**

**Pembimbing I**



**H. M. Imran Arief, S.H., M.S.**  
NIP. 19470915 197901 1 001

**Pembimbing II**



**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nam : **NUR IMAN**  
No. Pokok : B111 10 325  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan  
(Studi Kasus No.803/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar. Juli 2014

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIRs 19630419 198903 1 003



## ABSTRAK

**Nur Iman ( B 111 10 325) “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks) ”. dibimbing oleh Bapak H. M. Imran Arief selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan berdasarkan pada data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara yakni mengadakan wawancara langsung dengan hakim dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi yakni penelusuran berkas perkara, buku-buku, internet dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 1) Penerapan hukum pidana pada perkara ini adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Namun, ada sedikit pandangan penulis yang berbeda terkait surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan biasa dan menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana pada dakwaan tunggal padahal menurut hemat penulis penuntut umum dapat menggunakan dakwaan subsidair dengan dakwaan primair menggunakan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana mengenai penadahan sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencaharian kemudian menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang penadahan biasa atau penadahan umum pada dakwaan subsidair. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, masyarakat juga harus melihat pidana penjara pada Pasal 480 ke-1 (satu) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun. Namun hakim juga harus memperhatikan dasar dan tujuan pembedaan itu sendiri, agar dengan sanksi pidana tersebut bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi atau meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad, SAW. sebagai panutan seluruh muslim dimuka bumi ini.

Penulis banyak menyadari berbagai kesukaran dan kesulitan serta hambatan yang penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat kesadaran jiwa, ketekunan, keuletan, dan doa maka kesulitan dan hambatan yang dialami dapat penulis atasi sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud.

Secara terkhusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda **Drs. AKHSAN M(alm)** dan Ibunda tersayang **ROSMIATY SOKKU**, sebagai ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, telah membesarkan serta mendidik dan membiayai penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada perguruan tinggi demi keberhasilan penulis. Begitu pula saudara-saudaraku yang tercinta,

**ASRIAWAL, S. SI. T, M. KES, MUHAMMAD IKHSAN, ST.** dan **MUHAMMAD ISNAN, AMD. KEP** yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Perkenankan pula pada kesempatan ini penulis menghanturkan hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina P., M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan para pembantu dekan.
3. Bapak **H. M. Imran Arief, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.**, bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.**, dan Bapak **Kaisaruddin S.H.**, selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
5. **Seluruh dosen, seluruh staf bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.



6. **Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf dan para karyawan dan karyawan** yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian. Terkhusus kepada Bapak **Muhammad Damis, S.H.**, dan Bapak **Isjuaedi, S.H.**, (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) yang telah bersedia memberikan banyak bantuan dan saran.
7. Keluarga besar JNK, sahabat, dan teman-temanku, **Dima Adinsa, Syaifullah Anwar, Junaedi Azis, Emi Humairah Hamzah, Bani Perdatawati Hasanuddin, Triya Wulandari, Nurul Fitriani Salim, Nabila, Mardewiwanti, Fahira, Asrul, Dedy Dermawan Armadi, Sumange, Djumhanudin Hi. Lolo, Muh. Sahlan Ramadhan, Nadli Affandy, Syifa Fauziah, dan Nuraliza Ariani**, terima kasih atas dorongan semangat, nasihat serta bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada rekan-rekan KKN Reguler Gel. 85 Desa Salubua, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu: **Ikhsan, Yaumil, Tary, Anmar, Santi, dan Melati**, yang dengan penuh rasa persaudaraan dan rasa persahabatan telah bersama-sama dengan penulis sehingga menyimpan memori nostalgia yang membahagiakan.
9. Teman-teman **LEGITIMASI 2010** yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari penyajian maupun dari penggunaan bahasa. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Akhir kata harapan penulis ke depan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama kepada penulis sendiri, serta dapat berguna baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun dalam ilmu hukum pada khususnya.

Makassar, Agustus 2014

Penulis,

**NUR IMAN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	9
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	14
B. Tindak Pidana Penadahan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	15
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan .....	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan .....	18
C. Pidana dan Pemidanaan.....	23
1. Pengertian Pidana .....	23
2. Jenis-jenis Pemidanaan.....	24
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	31

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	35
1. Pertimbangan Yuridis .....	35
2. Pertimbangan Sosiologis .....	39
<b>BAB III METODE DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Data .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 803/ Pid.B/ 2013/ PN. Mks).....	42
1. Duduk Perkara.....	42
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	43
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	45
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 803/ Pid.B/ 2013/ PN. Makassar .....	46
5. Analisis Hukum.....	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 803/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks) .....	57
1. Pertimbangan Hakim .....	57
2. Analisis Hukum.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari interaksi antar sesama manusia dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan banyak masalah. Hukum hadir sebagai pranata sosial yang berfungsi untuk mengatur interaksi tersebut agar sesuai dengan tujuan dan pengaturan hukum itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum Pidana.<sup>1</sup>

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana ) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut“.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara: Jakarta, hlm. 7.



Hukum Pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Sebagai gambaran mengenai hukum pidana, Adami Chazawi mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang<sup>2</sup>:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, Jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

---

<sup>2</sup> Ali, Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hlmn. 3.

Dari gambaran di atas, Adami Chazawi memberikan pengertian hukum pidana berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dimana perbuatan ini adalah suatu perilaku menyimpang dan tercela sehingga dapat meresahkan masyarakat, berhubungan juga dengan pembedaan sebagai proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, serta bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagai negara yang berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satu yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang semakin pesat. Adapun sebab timbulnya suatu kejahatan dalam teori yang dijelaskan adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatri)  
Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensi, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.
2. Teori Biologis  
Teori mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, 1994, Psikologi untuk manajemen. Perusahaan dan industri. PT. Grafindo Persada : Jakarta. Hlmn 25

kebudayaan si pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.

### 3. Teori Sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial.

Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.

### 4. Teori Subkultur

Teori sangat ditentukan oleh faktor lingkungan.

Bonger, Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain (Mazgab Lingkungan), (Widiyanti, 1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh
- c. Lingkungan ekonomi
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).

Berdasarkan teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan yang berinteraksi secara langsung oleh orang tersebut dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk di dalam masyarakat. Menjawab persoalan tersebut, maka dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Salah satu penggolongan kejahatan berdasarkan kepentingan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*)<sup>4</sup>. Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan konvensional yang telah banyak dilakukan oleh kriminil atau pelaku

---

<sup>4</sup> A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi. Reflexi : Makassar. Hlmn 22

kejahatan seperti : pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPidana mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal yang menarik kemudian untuk diketahui yaitu mengenai kejahatan penadahan. Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 ke-1 KUHPidana.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak.

Sebagaimana manusia yang tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatannya atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima gadai, menerima barang tersebut sebagai hadiah, ataupun mereka yang membantu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana orang yang membantu atau memudahkan kejahatan ini disebut sebagai penadah dan proses atau interaksi ini biasa disebut sebagai penadahan.

Dengan adanya penadahan ini maka tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan berinteraksi dengan lapisan masyarakat dimana tempat kita berada.

Kasus Perkara Putusan Nomor: 803/ Pid. B/ 2013/ PN. Makassar merupakan kasus pedahan Pasal 480 KUHPidana. Dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Baharuddin Alias Acos, telah



memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHPidana. Oleh karena itu, terdakwa kemudian dijatuhi keputusan berupa pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari. Menarik untuk diamati bagaimana penerapan hukum yang telah ditetapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Apakah syarat-syarat untuk dapat dipidanya pada tindak pidana penadahan telah terpenuhi dalam proses persidangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana penadahan sehingga penulis memilih judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No. 803/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan (studi kasus putusan No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan (studi kasus putusan No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks)?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan (studi kasus putusan No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks)?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan (studi kasus putusan No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks)?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak pidana penadahan. Selain itu, juga sebagai wahana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang tindak pidana penadahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* merupakan istilah Belanda, yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.<sup>5</sup>

Sudarto<sup>6</sup> mengatakan : *Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

- a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen S. 1948 – 17 dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

---

<sup>5</sup> P.A.F., Lamintang 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, hlm. 72

<sup>6</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, Hal 23.

- g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya<sup>7</sup>.

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe<sup>8</sup> mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.

Sudaryanto<sup>9</sup> mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Pompe<sup>10</sup> juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

---

<sup>7</sup> *Ibit*, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibit*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang : Yogyakarta. Hlm. 2.

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 91.

1. Definisi teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Ridwan Halim<sup>11</sup> yaitu Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang<sup>12</sup> mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Moeljatno<sup>13</sup> menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>11</sup> A. Ridwan Halim, 1987. *Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analisa dan logika sosial*. Puncak Karma, Jakarta, hlm. 33

<sup>12</sup> P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123.

<sup>13</sup> Moeljatno Op.cit. hlm. 50.



aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Vos<sup>14</sup> merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.72.

Sementara itu Leden Marpaung<sup>15</sup>, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

a. unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas :

1) Pebuatan manusia berupa:

- a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman . Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 9.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (*voortduren delicten*);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria delicate*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan anatara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121.

- terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).
  - l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni. Pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

## **B. Tindak Pidana Penadahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia<sup>17</sup> disebutkan :

Tadah : barang apa yang dipakai untuk menadah.

Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.

Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.

Pengertian yang diberikan dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu.

Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya

---

<sup>17</sup> Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 989

kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan**

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut :

1. Penadahan dalam bentuk Pokok (Pasal 480 KUHPidana)

Pada Pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut<sup>18</sup>:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

## 2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pada Pasal 481 KUHPidana diatur sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

## 3. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut<sup>20</sup>:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

## 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor:Politeia, hlm. 314

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 316

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 316

Penadahan termasuk delik permudahan, dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan, maka ada tempat penyaluran untuk benda hasil kejahatan tersebut.

Pada bagian ini penulis akan akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana.

Pada Pasal 480 KUHPidana mengatur sebagai berikut<sup>21</sup>:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur kejahatan penadahan adalah :

1. Unsur Objektif :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 314



- b. Untuk mendapat keuntungan,
- c. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan,
- d. Sesuatu barang,
- e. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

Tanda koma memisahkan kata membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, dan mengambil keuntungan, berarti tindakan tersebut merupakan alternatif dimana ketika salah satu tindakan yang menjadi unsur objektif tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi unsur subjektifnya maka orang yang melakukan salah satu tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penadahan.

## 2. Unsur subjektif :

- a. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
- b. Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.

Untuk lebih jelasnya, unsur yang pokok dari kejahatan penadahan<sup>22</sup> sebagai berikut :

- 1. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang,
- 2. Barang yang diperoleh karena kejahatan,
- 3. Diketuainya atau patut dapat disangkanya.

---

<sup>22</sup> Moch Anwar, 1986, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 82

- Ad.1. Mengambil keuntungan dapat dipersamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan diharapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu.
- Ad.2. Hasil berarti apa yang dihasilkan dari barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh dengan pencurian, penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaian barang itu. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari pendapat itu.
- Ad.3. Untuk diketahuinya atau patut disangkanya, terdapat unsur sengaja maupun *culpa* :
- a. Unsur sengaja/*dolus* : dengan kata diketahuinya.  
Sengaja sebagai maksud (niat) adalah bahwa suatu tindakan dan akibat yang betul-betul sebagai kehendak dan keinsyafan pelaku. Sedangkan dalam hal lainnya, dengan maksud lainnya digunakan sebagai pengganti istilah dengan sengaja yang pengertiannya mungkin lebih sempit, mungkin sama dan bahkan mungkin lebih kluas dari pengertian dengan sengaja itu sendiri. Sengaja insaf akan kemungkinan adalah mempunyai pengharapan, seharusnya dapat mengetahui, sangat mungkin, tidak sama benar artinya dengan menghendaki dan menginsyafinya. Sengaja insaf akan kepastian adalah menurut Jonkers, menyimpulkan bahwa pengertian dari diketahui termasuk istilah sengaja dalam arti dikehendaki dan diinsyafi, tidak boleh diartikan sebagai pengetahuan mutlak.
  - b. Unsur *culpa* : dengan kata patut atau disangkanya.  
Bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Moch Anwar<sup>23</sup>, menjelaskan mengenai cara memperoleh barang sebagai berikut :

1. Cara membeli barang ;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 83

Tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu.

2. Cara penjualan barang ;

Barang seperti radio, tv, mesin tik dibawa ke rumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli tidak saling mengenal.

3. Harga barang ;

Harga barang yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasaran.

4. Keadaan penjual :

Sikap dan pakaian serta sikap memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur-unsur yang penting dalam Pasal 480 KUHPidana, ialah pelaku kejahatan penadahan harus dapat mengetahui atau patut harus menyangka, bahwa barang yang ditawarkan itu berasal dari kejahatan. Pelaku kejahatan penadahan tidak perlu mengetahui dengan pasti jenis kejahatan apa sehingga barang itu dapat diperoleh. Apakah dengan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain-lain sebagainya, hal ini tidak begitu penting. Sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang yang didapat dari hasil kejahatan, bukan barang yang berasal dari perbuatan yang patut dan diperbolehkan oleh hukum.

Adapun pada Pasal 481 KUHPidana, unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan penadahan tersebut adalah penadahan sebagai kebiasaan adalah tindak pidana penadahan itu sendiri haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan

Pasal 481 KUHPidana tetapi bersesuaian dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Adapun pada Pasal 482 KUHPidana, unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan penadahan tersebut tergolongkan dalam penadahan ringan adalah tindak pidana penadahan itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau berasal dari tindak pidana penipuan ringan.

## **C. Pidana Dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi<sup>24</sup>, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara

---

<sup>24</sup> Chazawi Op.cit. hlmn. 24.

menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

## **2. Jenis-jenis Pemidanaan**

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidan dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

### **a. Pidana pokok terdiri dari:**

#### **1. Pidana mati;**

2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

**Ad.a. Pidana pokok terdiri dari :**

1. Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu

terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sengat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni<sup>25</sup>:

- a. Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat (2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2))

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 34-35.

KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni : (1) Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan (2) maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.<sup>26</sup>

### 4. Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 38.



jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

##### 5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Undang-Undnag Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

**Ad.b. Pidana tambahan terdiri dari :**

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos<sup>27</sup>, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
2. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana<sup>28</sup>, yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat(*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta: Jakarta. hlm. 211.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 212.

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

## 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu<sup>29</sup>:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, 1995, *Op.cit*, hlm. 57.

### 3. Pidana pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

### 3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergelding theorieen*);

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*);
3. Teori gabungan (*verenigingstheorieen*).

**Ad. 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive / vergelding theorieen*)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagaimana dikutip Muladi<sup>30</sup> mengatakan :

" .....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum"

---

<sup>30</sup> *Opcit* Andi Hamzah, 1991, hlm. 11.

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas mendasarkan pada "*the philosophy of vengeance*" atau filsafat pembalasan di dalam mencari dasar pembenaran dari pembedaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen<sup>31</sup> memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

- a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## **Ad. 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*)**

Teori relatif berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganjur teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa pembedaan itu sendirilah yang menjadi tujuan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.

pemidanaan, melainkan pemidanaan itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pada pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dengan demikian mempunyai tujuan, oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

### **Ad. 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorieen*)**

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan

*prevensi general*. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang di ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>33</sup>. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

###### **a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana**

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2008, *Op.cit*, hlm.166.

<sup>33</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana, suatu pengantar*, Mahakarya Rangkang: Yogyakarta, hlm. 369.



untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

1. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: "Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga". Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi,

sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

### 3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak

berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain sebagainya.

#### **b. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana**

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum yaitu:

##### **1. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997**

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dasar peringanan pidana pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

##### **2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan**

Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.

Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini tersebar dalam Pasal-pasal KUHPidana. Contohnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana, yang

unsur diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari 250 rupiah

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Instansi terkait. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat penyelesaian kasus Penadahan dengan nomor perkara No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

##### **1. Data Primer**

Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

##### **2. Data Sekunder**

Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencakup buku-buku, putusan pengadilan (yurisprudensi) atau peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Studi Lapangan**

Studi Lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek-objek atau sumber data yang berkaitan dengan penelitian baik dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut maupun mencari data berupa arsip atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber.

### **D. Analisis Data**

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, adapun deskriptif kualitatif adalah memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini secara umum kemudian dikongkritkan menjadi lebih khusus.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 803/ Pid.B/ 2013/ PN. Mks)**

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 803/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

##### **1. Duduk Perkara**

Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 803/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Faisal Raya I Kompleks perumahan Phinisi Nusantara Blok C5 Kota Makassar, Ari Wibowo bertemu dengan Rizki(12) yang tengah bermain di teras depan rumah korban dan Ari Wibowo bertanya kemana penghuni rumah tersebut dan Rezki menjawab bahwa penghuni rumah yakni Hj. Syamsuhada sedang keluar rumah dan anaknya yaitu Indah berangkat ke sekolah. Selanjutnya Ari Wibowo berpura-pura mengatakan kepada Rezki bahwa dirinya diminta oleh Indah untuk mengambil Laptop Milik Indah dan dijawab oleh Rezki bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Ari Wibowo menyuruh Rezki untuk mencari kunci rumah tersebut dan pada akhirnya Ari Wibowo menemukan kunci rumah tersebut pada suatu tempat yang ditinggalkan oleh pemilik rumah di sekitar rumah tersebut, dengan menggunakan kunci tersebut, Ari Wibowo masuk ke dalam rumah dan mengambil : 1(satu)

kamera *Canon* warna hitam, 1(satu) *Handphone BlackBerry Torch* putih, 1(satu) cincin emas, 1(satu) *Handphone Samsung Galaxy Note* warna putih, 1(satu) unit Laptop *Toshiba* warna biru. Setelah mengambil barang-barang tersebut, maka Ari Wibowo pergi meninggalkan rumah untuk selanjutnya barang-barang tersebut untuk dijual kepada terdakwa Baharuddin Als. Acos, yakni : 1(satu) kamera *Canon* warna hitam seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) *Handphone BlackBerry Torch* putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit Laptop *Toshiba* warna biru seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang lain yaitu 1(satu) cincin emas dan 1(satu) *Handphone Samsung Galaxy Note* warna putih disimpan dan digunakan sendiri oleh Ari Wibowo.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

----- Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN ALS. ACOS, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa awalnya saksi ARI WIBOWO yang saat melintas di depan rumah korban Hj. SYAMSUDUHA bertemu saksi REZKI yang pada saat itu tengah bermain di depan teras rumah korban.
- Setelah bertemu dengan saksi REZKI, ARI WIBOWO menanyakan kemana penghuni rumah tersebut dan dijawab



oleh saksi REZKI bahwa Hj. SYAMSUDUHA sedang keluar sedangkan anaknya yaitu Indah masih sekolah.

- Bahwa selanjutnya ARI WIBOWO berpura-pura mengatakan kepada saksi REZKI bahwa dirinya di suruh oleh INDAH untuk mengambil Laptop milik INDAH, dan dijawab oleh saksi REZKI bahwa rumah tersebut terkunci, selanjutnya ARI WIBOWO menyuruh saksi REZKI untuk mencari kunci rumah tersebut sampai pada akhirnya ARI WIBOWO menemukan kunci rumah tersebut pada suatu tempat dan dengan menggunakan kunci rumah tersebut, ARI WIBOWO masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Hj. SYAMSUDUHA yang diantaranya adalah:
  1. 1(satu) kamera canon warna hitam
  2. 1(satu) HP Blackberry Tournch Biru
  3. 1(satu) Laptop Toshiba biru
  4. 1(satu) cincin emas
  5. 1(satu) Samsung Galaxy Note
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka saksi Ari Wibowo pergi meninggalkan rumah untuk selanjutnya barang-barang tersebut dijual kepada terdakwa Baharuddin Als. Acos yaitu sebagai berikut :
  1. 1(satu) kamera *Canon* warna hitam seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah),
  2. 1(satu) *Handphone BlackBerry Torch* putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
  3. 1(satu) unit Laptop Toshiba warna biru seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Sedangkan barang lain yaitu : 1(satu) cincin emas dan disimpan dan 1(satu) Samsung Galaxy Note digunakan sendiri oleh saksi ARI WIBOWO.
- Adapun barang-barang yang diperolehnya dari saksi ARI WIBOWO telah dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atas adanya penjualan tersebut, adapun barang itu diantaranya adalah sebagai berikut :
  - 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui jika harga barang yang ditawarkan oleh saksi ARI WIBOWO adalah harga barang yang ditawarkan oleh saksi ARI WIBOWO adalah harga barang yang

terlalu murah ataupun dibawah harga pasaran dari harga barang yang dimaksud, selain itu terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan tetap saksi ARI WIBOWO adalah sebagai penjual barang-barang bekas elektronik, terdakwa tidak pula membuat bukti penjualan yang menerangkan bahwa benar barang yang dibelinya dari saksi ARI WIBOWO adalah bukan dari hasil kejahatan terdakwa beli sesuai dengan harga pasaran, maka dengan demikian sejatinya terdakwa patut menduga bahwa barang-barang yang dibelinya dari saksi ARI WIBOWO adalah dari kejahatan.

- Bahwa atas adanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Hj. SYAMSUDUHA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALS. ACOS, bersalah melakukan “Tindak pidana Panadahan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin alias Acos, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note warna putih;
  - 1 (satu) cincin emas;digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ari Wibowo.
- 4) Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

#### **4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 803/ Pid.**

##### **B. 2013/ PN. Makassar**

Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada persidangan hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a.n. BAHRUDDIN ALS. ACOS oleh JANVERSON SINAGA, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, PUDJO HUNGGUL.H, S.H., M.H., dan ISJUAEDI, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh ALID BURHAN, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh INDRASWATY, S.H, M.H., jaksa penuntut umum dan terdakwa, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa BAHRUDDIN ALS. ACOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- Menghukum terdakwa BAHRUDDIN ALS. ACOS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) cincin emas, dipergunakan dalam berkas perkara lain;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-- (dua ribu rupiah).

## 5. Analisis Hukum

Secara sederhana, hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil merupakan isi atau materi dari hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana proses atau cara yang ditempuh untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materiil itu sendiri. Simons<sup>34</sup> menyatakan bahwa:

“Hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian-uraian delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarfeit*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana”.

Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materiil juga dapat dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno<sup>35</sup>, yang menyatakan bahwa :

“Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan”.

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit.*, hlm.3.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dihukum yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya pada Putusan Perkara No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana. Terlebih dahulu penulis ingin mengomentari bagaimana hubungan dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan dalam perkara ini secara garis besar. Penuntut umum dituntut untuk betul-betul cermat dan hati-hati dalam merumuskan dakwaannya. Kekurang cermatan, ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan, akan mengakibatkan dakwaan batal

demikian hukum (*van rechtswege nietig/null and void*)<sup>36</sup>. Dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dari dakwaan yang disusun, dapat dilihat terlebih dahulu penuntut umum menjelaskan mengenai barang yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah barang hasil kejahatan dan tidak menggunakan penggabungan berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemisahan penuntutan perkara dikarenakan para tersangka saling menjadi saksi sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka untuk menguatkan dakwaan penuntut umum. Penuntut umum sangat yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan biasa dan menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana pada dakwaan tunggal padahal menurut hemat penulis penuntut umum dapat menggunakan dakwaan subsidair dengan dakwaan primair menggunakan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana mengenai penadahan sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencaharian dan kemudian menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang penadahan biasa atau penadahan umum pada dakwaan subsidair. Penulis berpendapat bahwa pelaku menjual barang tadahan tersebut di daerah yang menjual barang-barang

---

<sup>36</sup> Harun M. Husein SH. Surat Dakwaan, teknik penyusunan fungsi, dan permasalahannya. Rineka cipta, 2005, jakarta hlmn 50.

elektronik dengan jenis seperti barang yang ditadah oleh pelaku dengan harga yang sangat murah, adapun barang yang diperjualbelikan pada lokasi tersebut tidak disertai kelengkapan-kelengkapan yang disertakan saat membeli pada dealer atau outlet resmi seperti : charger ataupun aksesoris lain yang *include* pada saat pembelian, buku panduan penggunaan, kardus atau pembungkus dengan mencantumkan nomer *id* atau nomer identitas lain yang sesuai dengan yang tertera pada barang tersebut, buku garansi, faktur/invoice pembelian saat pembelian pertama jika barang tersebut benar merupakan barang bekas, surat pernyataan bahwa barang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan, kelengkapan tersebut termasuk kelengkapan yang tidak dimiliki oleh terdakwa sehingga memenuhi salah satu unsur yang melengkapi unsur yang lainnya untuk dijerat dengan tindak pidana penadahan. Bahkan penjualan barang-barang di tempat tersebut tidak menggunakan faktur penjualan(yang mencantumkan identitas penjual, identitas pembeli, dan nominal harga serta penjelasan mengenai merek dan spesifikasi barang tersebut) terbukti bahwa terdakwa Baharuddin alias Acos tidak mengetahui secara jelas kapan penjualan barang hasil kejahatan yang merupakan milik Hj. Syamsuduha tersebut ia jual. Tidak sampai disitu, lokasi tempat terdakwa menjual barang-barang hasil tadahan tersebut terdapat lapak, meja, dan perlengkapan menjual lainnya yang ditinggalkan saat meninggalkan lokasi, dengan kata lain bahwa

penjual akan datang keesokan harinya dan melakukan kegiatan tersebut secara berulang, sebagai kebiasaan, dan sebagai mata pencaharian untuk itu penulis berkesimpulan bahwa ada indikasi bahwa pelaku telah melakukan hal tersebut lebih dari 1(satu) kali, sebagai kebiasaan dan sebagai mata pencaharian dan memenuhi unsur untuk membuat surat dakwaan subsidair. Adapun dengan penggunaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut, maka pembuktian lebih cenderung kepada terdakwa Baharuddin alias Acos yang membeli barang hasil kejahatan dari saksi Ari Wibowo padahal setelah membeli barang hasil kejahatan dari saksi Ari Wibowo terdakwa menjual barang tersebut kepada orang lain.

Berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis berkesempatan untuk dapat melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara ini. Penulis sempat mewawancarai hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Bapak Isjuaedi, S.H., M.H. yang pada saat itu bertindak sebagai hakim anggota, untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang penulis bahas.

Adapun pendapat hakim Isjuaedi, S.H., M.H., tentang bagaimana hakim menyikapi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, yaitu:

“Dakwaan itu adalah kewenangan sepenuhnya dari penuntut umum mau disusun secara komulatif, disusun secara alternatif, itu terserah penuntut umum, kewenangan dan hak penuh penuntut umum. Tergantung dia melihat kasus itu, biasanya



hanya mengambil yang paling mudah untuk dibuktikan, mau menyusun banyak-banyak juga percuma juga kalau pembuktiannya ternyata sulit”.

Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, setelah dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dimuka pengadilan. Kemudian penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang merupakan dakwaan tunggal, maka tentu saja Majelis Hakim akan memusatkan perhatian pada pembuktian tindak pidana penadahan biasa dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis bahas, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara No.803/Pid.B/ 2013/PN.Mks., hakim memandang bahwa dakwaan dapat diproses dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara No.803/Pid.B/ 2013/PN.Mks., yang telah dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut.

1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terdakwa Baharuddin Als. Acos dengan identitas selengkapnya tercantum dalam surat dakwaan dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaannya dan mengakui perbuatannya. Sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan. Terdakwa juga menyatakan dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang.

Dalam suatu tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana penadahan maka apabila terbukti salah satu

unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dikarenakan uraian unsur di atas bersifat alternative yang apabila terbukti salah satunya maka unsur tersebut telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam waktu-waktu di antara bulan Februari sampai dengan Maret 2013 WITA, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Makassar tempat terdakwa menjual barang elektronik bekas berupa 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diperoleh dengan cara membeli beberapa barang bekas dari saksi Ari Wibowo, adapun barang-barang tersebut adalah :

1. 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 1(satu) HP Blackberry Tournch putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3 1(satu) Laptop Toshiba biru seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dari rangkaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa telah membeli, atau karena mau mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, suatu barang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Melihat fakta hukum yang diperoleh terkait dengan tindak pidana penadahan, penadahan yang terjadi dalam kasus ini dapat digolongkan dalam tindak pidana penadahan umum akan tetapi menurut penulis tidak tertutup kemungkinan bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan.

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang-barang yang telah diperolehnya dari saksi Ari Wibowo telah dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atas adanya penjualan barang tersebut, yakni 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang ditawarkan oleh saksi Ari Wibowo adalah harga barang yang terlalu murah ataupun di bawah harga pasaran dari harga barang yang dimaksud, selain itu terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan tetap saksi Ari Wibowo adalah sebagai penjual barang-barang bekas elektronik , terdakwa

tidak pula membuat bukti penjualan yang menerangkan bahwa benar barang yang dibelinya dari saksi Ari Wibowo adalah bukan dari hasil kejahatan dan terdakwa beli sesuai dengan harga pasaran, maka dengan demikian sejatinya terdakwa patut menduga bahwa barang-barang yang dibelinya dari saksi Ari Wibowo adalah dari kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Memahami penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ada, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana penadahan dalam kasus ini telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta putusan majelis hakim.

Berdasarkan uraian setiap unsur-unsur tindak pidana di atas, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara dengan No. Register Perkara No. 803/Pid.B/2013/PN.Mks ini yakni Pasal 480 ke-1 KUHPidana adalah Tepat.

Selanjutnya, untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap seseorang tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap unsur dalam tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Melainkan ada hal-hal lain yang harus terpenuhi, yakni unsur pertanggungjawaban pidana terkait dengan cakap(mampu) tidaknya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus tidak

adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan si pembuat.

Terdakwa Bahrudin Als. Acos di dalam proses persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keadaan dan kemampuan jiwa yang abnormal. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga meninjau apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) KUHPidana bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana, berkaitan dengan ada tidaknya alasan penghapusan pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Percobaan Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 803/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks)**

**1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara percobaan tindak pidana penadahan dalam putusan No. 803/Pid. B/ 2013/ PN. Mks., didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman

pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan untuk memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu:

**a. Keterangan Saksi**

**1. Saksi Hj. Syamsuduha (Saksi Korban)**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah saksi yaitu Kompleks perumahan Phinisi Nusantara Blok C5 Kota Makassar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang yaitu : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) Blackberry Tournch warna putih, 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam, dan 1 (satu) cincin emas;
- Bahwa adapun saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan pada saat itu meninggalkan rumah saksi meninggalkan kunci rumah di sekitar rumah;
- Bahwa dari kejadian tersebut, kerugian saksi ditaksir sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

**2. Saksi Nur Aisyah Indah Sari**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah saksi yaitu Kompleks perumahan Phinisi Nusantara Blok C5 Kota Makassar;

- Bahwa saksi telah kehilangan barang yaitu : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) Blackberry Tournch warna putih, 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam, dan 1 (satu) cincin emas;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik dari ibu saksi yaitu saksi Hj. Syamsuduha;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

### 3. Saksi Rizky

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah saksi yaitu Kompleks perumahan Phinisi Nusantara Blok C5 Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi Ari Wibowo yang saat melintas di depan rumah korban Hj. Syamsuduha bertemu saksi Rezky yang pada saat itu tengah bermain di depan teras rumah korban.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rezky, saksi Ari Wibowo menanyakan kemana penghuni rumah tersebut dan dijawab oleh saksi Rezky bahwa Hj. Syamsuduha sedang keluar sedangkan anaknya yaitu Indah masih sekolah.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Wibowo berpura-pura mengatakan kepada saksi Rezky bahwa dirinya disuruh oleh Indah untuk mengambil Laptop milik Indah, dan dijawab oleh saksi Rezky bahwa rumah tersebut terkunci.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Wibowo menyuruh saksi Rezky untuk mencari kunci rumah tersebut sampai pada akhirnya saksi Ari Wibowo menemukan kunci rumah tersebut pada suatu tempat dan dengan menggunakan kunci rumah tersebut, saksi Ari Wibowo masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Hj. Syamsuduha yang diantaranya : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) Blackberry Tournch warna putih, 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam, dan 1 (satu) cincin emas;

### 4. Saksi Ari Wibowo



- Bahwa setelah bertemu dengan saksi rezky, saksi Ari Wibowo menanyakan kemana penghuni rumah tersebut dan dijawab oleh saksi Rezky bahwa Hj. Syamsuduha sedang keluar sedangkan anaknya yaitu Indah masih sekolah.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Wibowo berpura-pura mengatakan kepada saksi Rezky bahwa dirinya disuruh oleh Indah untuk mengambil Laptop milik Indah, dan dijawab oleh saksi Rezky bahwa rumah tersebut terkunci.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Wibowo menyuruh saksi Rezky untuk mencari kunci rumah tersebut sampai pada akhirnya saksi Ar Wibowo menemukan kunci rumah tersebut pada suatu tempat dan dengan menggunakan kunci rumah tersebut, saksi Ari Wibowo masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Hj. Syamsuduha yang diantaranya : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) Blackberry Tournch warna putih, 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam, dan 1 (satu) cincin emas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka saksi Ari Wibowo pergi meninggalkan rumah untuk selanjutnya barang-barang tersebut dijual kepada terdakwa Baharuddin Als. Acos yaitu sebagai berikut : 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) HP Blackberry Tournch putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) Laptop Toshiba biru seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang lain yaitu 1 (satu) HP Samsung Note warna putih disimpan dan digunakan sendiri oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

#### **b. Keterangan Terdakwa**

Adapun keterangan terdakwa BAHARUDDIN Alias ACOS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka saksi Ari Wibowo pergi meninggalkan rumah untuk selanjutnya barang-barang tersebut dijual kepada terdakwa

Baharuddin Als. Acos yaitu sebagai berikut : 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) HP Blackberry Tournch putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) Laptop Toshiba biru seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang lain yaitu 1 (satu) HP Samsung Note warna putih disimpan dan digunakan sendiri oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa adapun barang-barang yang diperolehnya dari saksi Ari Wibowo kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atas adanya penjualan barang tersebut, adapun barang itu adalah 1 (satu) Kameran Canon warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa barang yang ditawarkan oleh Ari Wibowo merupakan barang yang murah dibanding dengan harga pasaran, selain itu terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan tetap saksi Ari Wibowo adalah sebagai penjual barang-barang beaks elektronik, terdakwa tidak pula membuat bukti penjualan yang menerangkan bahwa benar barang yang dibelinya dari saksi Ari Wibowo adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar serta ia tidak merasa ditekan atau dipaksa serta diarahkan dalam memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan sudah benarsemua yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **c. Barang bukti**

Adapun barang bukti yang didapatkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note warna putih;
- 1 (buah) cincin emas.

Mejelis hakim telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau dihukum ringan-ringannya.

Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, dan barang bukti maka didapatlah fakta-fakta hukum dipersidangan. Dimana keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti dipersidangan. Fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah saksi yaitu Kompleks perumahan Phinisi Nusantara Blok C5 Kota Makassar;
- Bahwa saksi korban Hj. Syamsuduha telah kehilangan barang yaitu : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) Blackberry Tourch warna putih, 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam, dan 1 (satu) cincin emas;
- Bahwa adapun saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan pada saat itu meninggalkan rumah saksi meninggalkan kunci rumah di sekitar rumah;
- Bahwa dari kejadian tersebut, kerugian saksi ditaksir sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Ari Wibowo yang saat melintas di depan rumah korban Hj. Syamsuduha bertemu saksi Rezky yang pada saat itu tengah bermain di depan teras rumah korban.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi rezky, saksi Ari Wibowo menanyakan kemana penghuni rumah tersebut dan dijawab oleh saksi Rezky bahwa Hj. Syamsuduha sedang keluar sedangkan anaknya yaitu Indah masih sekolah.

- Bahwa selanjutnya saksi Ari Wibowo berpura-pura mengatakan kepada saksi Rezky bahwa dirinya disuruh oleh Indah untuk mengambil Laptop milik Indah, dan dijawab oleh saksi Rezky bahwa rumah tersebut terkunci.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Wibowo menyuruh saksi Rezky untuk mencari kunci rumah tersebut sampai pada akhirnya saksi Ari Wibowo menemukan kunci rumah tersebut pada suatu tempat dan dengan menggunakan kunci rumah tersebut, saksi Ari Wibowo masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Hj. Syamsuduha yang diantaranya : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) Blackberry Tourch warna putih, 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam, dan 1 (satu) cincin emas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka saksi Ari Wibowo pergi meninggalkan rumah untuk selanjutnya barang-barang tersebut dijual kepada terdakwa Baharuddin Als. Acos yaitu sebagai berikut : 1(satu) kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) HP Blackberry Tourch putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) Laptop Toshiba biru seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang lain yaitu 1 (satu) HP Samsung Note warna putih disimpan dan digunakan sendiri oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa adapun barang-barang yang diperolehnya dari saksi Ari Wibowo kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atas adanya penjualan barang tersebut, adapun barang itu adalah 1 (satu) Kamera Canon warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa barang yang ditawarkan oleh Ari Wibowo merupakan barang yang murah dibanding dengan harga pasaran, selain itu terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan tetap saksi Ari Wibowo adalah sebagai penjual barang-barang bekas elektronik, terdakwa tidak pula membuat bukti penjualan yang menerangkan bahwa benar barang yang dibelinya dari saksi Ari Wibowo adalah dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa ia terdakwa Baharuddin alias Acos telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni saksi 1. Hj. Syamsuduha, 2. Nur Aisyah Indah Sari, 3. Rizky, 4. Ari Wibowo sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) cincin emas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “penadahan”, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim meninjau apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, berkaitan dengan ada tidaknya alasan penghapusan pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak melihat adanya

alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diprhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) cincin emas;

Menimbang karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebanipula biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

2. Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum dihukum.

Adapun isi amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 803/

Pid. B/ 2013/ PN. Mks., yaitu :

### **MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa BAHRUDDIN ALS. ACOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- Menghukum terdakwa BAHRUDDIN ALS. ACOS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) cincin emas, dipergunakan dalam berkas perkara lain;  
Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-- (dua ribu rupiah).

## **2. Analisis Hukum**

Dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting, hakim dianggap tahu segalanya tentang hukum (*Ius Curia Novit*) karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian dan kecermatan hakim dalam menggali informasi yang nyata tentang kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Hakim

dituntut harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya dalam memutus suatu perkara.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut, demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan kausa atau hubungan sebab-akibatnya.

Adapun mengenai alat bukti disebutkan dalam KUHP. Dimana, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP<sup>37</sup> alat bukti yang diakui adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Adapun hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sesuai dengan bunyi Pasal 184 ayat (2) KUHP

---

<sup>37</sup> KUHP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78.



Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks., yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

**a. Keterangan saksi**

Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di muka persidangan. Sebagaimana yang sebutkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP<sup>38</sup>, yang berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Untuk selanjutnya sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana Pasal 160 ayat (3) KUHAP<sup>39</sup> yang menyatakan :

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,

---

<sup>38</sup> *Ibit.*, hlm., 8.

<sup>39</sup> *Ibit.*, hlm., 70.

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks., bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim memeriksa 4 (dua) orang saksi yaitu saksi (1) Hj. Syamsuduha(saksi korban), (2) Saksi Nur Aisyah Indah Sari, (3) Saksi Rizky, dan (4) Saksi Ari Wibowo dengan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Mengenai keterangan saksi yang menjadi alat bukti, Pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (7) KUHAP<sup>40</sup>, disebutkan bahwa :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Melihat penjelasan 2 (dua) pasal di atas, terdapat dua indikator agar keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. (1) Pertama, keterangan dari saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan dan kedua (2) keterangan saksi harus dibawah sumpah. Jika dikaitkan dengan proses pemeriksaan di persidangan pada kasus yang penulis bahas bahwa semua saksi memberikan keterangannya di persidangan dan telah bersumpah sesuai dengan keyakinannya.

---

<sup>40</sup> *Ibit.*, hlm., 79.

Mengingat, adanya asas “*Unus Testis Nullus Testis*” yakni satu saksi bukanlah saksi. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP<sup>41</sup> yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Adapun pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP<sup>42</sup> menambahkan terkait hal tersebut yang berbunyi:

“Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Penulis berpendapat bahwa pasal ini cukup untuk menentukan bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini. Dimana dengan adanya pasal ini, menurut penulis menarik kesimpulan bahwa keterangan dari ke-4(empat) saksi sebagai satu alat bukti yang sah. Karena menurut pasal ini, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan saksi lebih dari 1 (satu) orang tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Seperti yang diketahui bahwa dalam perkara ini pengajuan alat bukti oleh penuntut umum bukan hanya keterangan saksi, tetapi disertai dengan alat bukti lainnya yakni adanya alat bukti keterangan terdakwa.

#### **b. Keterangan terdakwa**

---

<sup>41</sup> *Ibit.*, hlm., 79.

<sup>42</sup> *Ibit*

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa itu dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP<sup>43</sup> yaitu sebagai berikut :

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.”

Lanjut dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP<sup>44</sup>, yang berbunyi :

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

Memahami Pasal 189 KUHAP di atas, diketahui bahwa keterangan terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan suatu tuduhan atas dirinya mengenai perbuatan dan kesalahan yang diucapkan di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, guna menentukan kesalahan terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat bukti apabila keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, disamping itu juga ada keterangan-keterangan dari pihak si korban yang membenarkan tentang pengakuan dari terdakwa.

---

<sup>43</sup> *Ibit.*, hlm., 81.

<sup>44</sup> *Ibit*

Menurut penulis, proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks., apabila dikaitkan dengan rumusan penjelasan di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dimana, selain adanya alat bukti keterangan terdakwa, juga ada keterangan saksi dalam proses sidang di pengadilan sehingga telah terungkap fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1(satu) KUHPidana.

### **c. Barang bukti**

Barang bukti tidak disebutkan secara langsung dan jelas dalam KUHP hanya menyebutkan tentang penyitaan.

Mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.<sup>45</sup>. bahwa:

“Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan jadi penyitaan bertujuan agar untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan.”

Mengenai penyitaan di sebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP<sup>46</sup> mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

---

<sup>45</sup> KUHP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78.

<sup>46</sup> *Ibit.*, hlm., 24.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Melihat pasal 39 ayat (1) KUHP dan pendapat Prof. Andi Sofyan mengenai barang bukti, jika dikaitkan dengan perkara Nomor: 803/Pid.B/2013/PN.Mks., maka penulis berkesimpulan bahwa barang bukti yang diadakan dipersidangan telah sesuai. Dimana terdapat 2 (dua) barang bukti dalam perkara ini. Masing-masing barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note warna putih dan 1 (satu) cincin emas milik korban yang menjadi barang bukti pada tindak pidana tersebut.

Proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks., apabila dikaitkan penjelasan di atas menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang diuraikan sebelumnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1(satu) KUHPidana, sehingga terdakwa Baharuddin alias Acos dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan

Majelis hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan juga tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga menurut penulis sudah sepantasnya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks., juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut di atas dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing alat bukti, di samping itu juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 480 ke-1(satu) KUHPidana sehingga majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15(lima belas) hari dikurangi masa tahanan yang telah dijalani untuk seluruhnya.

Penjatuhan putusan dalam perkara ini juga dengan menghadirkan terdakwa, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHP<sup>47</sup> yang merumuskan sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.,83.

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa saja.

Pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat penjatuhan pidana telah dilaksanakan dengan proses yang dengan mengacu kepada hukum pidana formil dan hukum pidana materil itu sendiri dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum telah diatur sedemikian dalam peraturan perundang-undangan seperti asas legalitas, dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Namun penulis mengakui bahwa vonis tersebut cenderung dianggap ringan oleh masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan vonis hakim yang kemungkinan dianggap ringan oleh masyarakat pada umumnya tersebut, hakim Isjuaedi, S.H., M.H., dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan:

“Kita selalu berpedoman pada fakta-faktanya, banyak unsur yang dipertimbangkan. Kenapa dia melakukan itu?, bagaimana cara dia melakukan itu?, Jika dilakukan seorang yang mampu maka hukumannya tentu akan berat, bila dia orang yang tidak mampu kemudian saat itu dia dalam keadaan yang amat sangat mendesak, sehingga dia melakukan hal tersebut akan meringankan, mungkin juga dia tidak tahu barang itu curian atau tidak, karena dia terjebak jual beli barang bekas,”.

Terkait dengan pemidanaan, Moeljatno<sup>48</sup> menyatakan bahwa:

---

<sup>48</sup> Moeljatno, 1985, *Op.Cit.*, hlm. 65.



“pidana kita bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi)”.

Memahami penjelasan di atas kemudian dikaitkan dengan judul tulisan dan perkara yang penulis bahas. Maka menurut penulis vonis pidana penjara selama 3 (bulan) dan 15 (lima belas) dalam perkara ini telah sesuai, adapun pidana penjara pada Pasal 480 ke-1 (satu) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun.

Penulis juga mengakui bahwa vonis tersebut cenderung dianggap ringan oleh masyarakat pada umumnya, melihat hal-hal yang meringankan dalam petikan putusan pada perkara ini yakni : terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum dihukum sebelumnya tentu masyarakat menganggap putusan tersebut cenderung ringan dibandingkan dengan hal yang memperberat yaitu perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.

Masyarakat juga harus melihat pidana penjara pada Pasal 480 ke-1 (satu) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun. Namun hakim juga harus memperhatikan dasar dan tujuan pembedaan itu sendiri, agar dengan sanksi pidana tersebut

bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi atau meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, adapun pemberian pidana penjara bagi seseorang berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Penulis menyadari, bahwa instrument pidana dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana preadahan. Namun, tetap saja menurut penulis ringan beratnya sanksi tetap memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) itu dimaksudkan bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 803/ Pid.B/ 2013/ PN. Mks., adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Namun, ada sedikit pandangan penulis yang berbeda terkait surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Penuntut umum sangat yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan biasa dan menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana pada dakwaan tunggal padahal menurut hemat penulis penuntut umum dapat menggunakan dakwaan subsidair dengan dakwaan primair menggunakan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana mengenai penadahan sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencaharian dengan ancaman hukuman yang lebih berat dan kemudian menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang penadahan biasa atau penadahan umum pada dakwaan subsidair. Dalam

perkara yang penulis bahas, pembuktian tindak pidana penadahan, lebih terpaku pada peristiwa jual-beli barang hasil kejahatan antara terdakwa dan Saksi Ari Wibowo yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dalam kasus penadahan. Menurut penulis, pembuktian dapat diperluas pada peristiwa terdakwa menjual barang hasil kejahatan yang diperoleh dari Ari Wibowo kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan di lokasi yang sering menjual barang-barang elektronik yang sejenis dengan barang yang terdakwa jual. Dalam hal ini sangat memungkinkan untuk terdakwa telah melakukan kegiatan penadahan tersebut lebih dari 1(satu) kali dan melakukan hal tersebut sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencahariannya. Lanjut untuk unsur pertanggungjawaban pidananya, terdakwa dalam proses persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keadaan dan kemampuan jiwa yang abnormal. Terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani dan karena dalam kasus ini majelis hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 803/Pid. B/ 2013/PN.Mks. didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim

tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh maka terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa tahanan yang telah dijalani untuk seluruhnya. Terkait dengan itu, mengingat judul penulis yang menitikberatkan pada tinjauan yuridis maka penulis berpendapat bahwa vonis tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masyarakat juga harus melihat pidana penjara pada Pasal 480 ke-1 (satu) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun. Namun hakim juga harus memperhatikan dasar dan tujuan pemidanaan itu sendiri, agar dengan sanksi pidana tersebut bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi atau meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, adapun

pemberian pidana penjara bagi seseorang berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan sosialisasi mengenai terhadap peraturan yang berlaku, tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan adakalanya masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan sebuah tindakan melanggar hukum, termasuk tentang penadahan yang sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui tentang adanya unsur patut mengetahui dalam penadahan baik dilakukan oleh pihak terkait maupun terhadap pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut dan adar aparat yang berwenang menindak secara teras setiap pelaku tindak pidana karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.

2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Ridwan Halim, 1987. *Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analisa dan logika sosial*. Puncak Karma, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang : Yogyakarta.
- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Reflexi : Makassar.
- Anwar, Moch. 1986, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Chazawi, Adami. 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121.
- \_\_\_\_\_. 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta: Jakarta.
- Harun M. Husein SH. 2005. *Surat Dakwaan, teknik penyusunan fungsi, dan permasalahannya*. Rineka cipta : Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1994, *Psikologi untuk Manajemen. Perusahaan dan Industri*. PT. Grafindo Persada : Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti: Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-teori-Parktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor:Politeia.
- Sofyan, Andi. 2013, *Hukum Acara Pidana, suatu pengantar*, Mahakarya Rangkang: Yogyakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.





## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) EMAIL : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

MAKASSAR 90111

Makassar, 22 Juli 2014

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ /434 / HKM/VII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**RAMLI DJALIL, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **NUR IMAN**  
No.Pokok : **B111 10 325**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Ilmu Hukum/Hukum Pidana**  
Alamat : **Jl. Sanrangan I Daya Regency B3 Makassar**  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENADAHAN (STUDI KASUS NO. 803 /PID.B/ 2013/  
PN.MKS)”**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014, dan telah dibimbing oleh :

1. **ISJUAEDI, SH.,MH.**

.Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor: 5039 / UN4.6.3/PL.02/2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**PANITERA/SEKRETARIS,**



**RAMLI DJALIL, SH.MH**  
**NIP.1962123119910310045**